PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**

UNIT KERJA : **SEKRETARIAT DAERAH**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MURDIANTO**
2. Jabatan : **ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**
3. NHK : **517314**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.110.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.125 m2/225 m2 di KAB / KOTA KOTABARU, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah Seluas 226 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
4. Tanah Seluas 9.189 m2 di KAB / KOTA KOTABARU, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 11.167 m2 di KAB / KOTA KOTABARU, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
6. Tanah Seluas 11.975 m2 di KAB / KOTA KOTABARU, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
7. Tanah Seluas 4.229 m2 di KAB / KOTA KOTABARU, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
8. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA KOTABARU, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTABARU, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 187.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
4. MOBIL, SUZUKI JEEP Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**35.000.000**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**----**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**106.451.500**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**2.438.951.500**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**----**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**2.438.951.500**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.